

Original Article

Pendekatan Korelasional Prediktif Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Provinsi Maluku 2005-2023

Endy Grade Tampubolon¹, Darwin Hartono¹, Moh. Irvan², Dewi Purwaningsih¹

¹Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

²Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta³

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2005 hingga 2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam bentuk deret waktu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan desain korelasional prediktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, UMP dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM justru menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pembangunan seperti kenaikan UMP dan pemerataan IPM lebih menekankan pada aspek pemerataan agar efektif dalam mengurangi kemiskinan,.

Kata Kunci: Pembangunan Manusia; Upah Minimum; Inflasi; Maluku.

Corresponding author: Endy Grade Tampubolon, Email: endy.unindra@gmail.com, and Indonesia



This work is licensed under a CC-BY

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam pembangunan ekonomi yang terus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah di berbagai daerah, termasuk Provinsi Maluku. Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik dengan tingkat isolasi yang tinggi, Maluku menghadapi tantangan khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kompleksitas permasalahan kemiskinan di Maluku tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga oleh dinamika ekonomi makro dan kebijakan pembangunan manusia yang diterapkan selama periode 2005-2023.

Dalam konteks teoretis, kemiskinan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta layanan dasar lainnya. Teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen menekankan pentingnya *capability approach* dalam memahami kemiskinan, yang tercermin dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, dari perspektif ekonomi makro, variabel seperti upah minimum dan inflasi memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan.

Provinsi Maluku, dengan total populasi sekitar 1,8 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 1.400 pulau, menghadapi tantangan unik dalam pembangunan ekonomi. Karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan menciptakan hambatan struktural berupa tingginya biaya transportasi,

keterbatasan infrastruktur, dan kesulitan akses terhadap pasar. Kondisi ini berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Data historis menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku mengalami fluktuasi sepanjang periode 2005-2023, dengan pola yang tidak selalu konsisten dengan tren nasional. Periode ini mencakup berbagai dinamika ekonomi nasional dan regional, termasuk krisis ekonomi global 2008, implementasi program-program pengentasan kemiskinan nasional, serta dampak pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020.

Menurut data dari (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2023), persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sempat naik menjadi 16,42 %, dengan jumlah sekitar 301.610 jiwa (ANTARA, 2023). Pada Maret 2024, angka itu menurun sedikit menjadi 16,05 % (sekitar 297.680 jiwa), namun masih lebih tinggi dibanding Maret 2022 (15,97 %) (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2024). Penurunan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbaikan, kemiskinan tetap menjadi masalah mendesak di wilayah ini—mengingat karakter geografis kepulauan yang memperburuk akses dan biaya distribusi. Data tren ini menambah urgensi analisis empiris terhadap variabel-variabel makro seperti IPM, UMP, dan inflasi selama periode 2005–2023, khususnya dalam konteks gangguan ekonomi seperti pandemi COVID-19, dan bagaimana dampaknya terhadap level kemiskinan di daerah dengan keterbatasan akses fisik seperti Maluku.

Sejumlah peneliti sebelumnya telah melakukan berbagai studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terhadap tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan beberapa prediktor utama, seperti kesehatan, tingkat pendidikan, dan upah minimum (Chairunnisa & Qintharah, 2022); tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka (Alifah & Imaningsih, 2023); produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia (IPM) (Suliswanto, 2010); jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia (Ristika et al., 2021); pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi (Gifelem et al., 2023); PDRB dan inflasi (Manangkalangi et al., 2020).

Pada penelitian ini menjadi penting karena pertama, masih sedikit kajian yang secara khusus menyoroti Maluku sebagai provinsi kepulauan, padahal karakteristik geografisnya berbeda signifikan dari daerah daratan. Kedua, penelitian terdahulu umumnya menggunakan periode data yang lebih pendek, sehingga kurang mampu menangkap dampak peristiwa ekonomi besar seperti krisis 2008 dan pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan rentang 2005–2023, yang lebih panjang dan komprehensif. Ketiga, mayoritas studi terdahulu hanya menguji dua variabel makro sekaligus, sementara penelitian ini menggabungkan IPM, UMP, dan inflasi secara simultan untuk melihat keterkaitannya dengan kemiskinan. Keempat, hasil penelitian dapat memberikan input empiris bagi formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan kontekstual untuk Provinsi Maluku dan atau sebagai referensi daerah kepulauan lainnya di Indonesia. Terakhir, penelitian ini berpotensi mengungkap fenomena *paradox of development*, yaitu ketika peningkatan IPM justru tidak selalu menurunkan kemiskinan, sebuah temuan yang jarang dibahas dalam konteks kepulauan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperkuat literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kombinasi variabel makroekonomi dan pembangunan manusia memengaruhi dinamika kemiskinan di daerah kepulauan seperti Maluku.

Pemilihan IPM sebagai variabel independen karena merepresentasikan aspek multidimensional pembangunan yang mencakup dimensi kesehatan (harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup (pengeluaran per kapita). Dalam konteks teori *capability approach*, peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kemampuan individu dalam mengakses peluang ekonomi dan sosial.

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah batas penghasilan terendah yang berlaku untuk seluruh pekerja formal di suatu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan

hidup layak (KHL), inflasi, produktivitas, dan kondisi ekonomi daerah. UMP Maluku dari tahun ketahun mengalami kenaikan dari Rp1.275.000 pada tahun 2013, Rp1.975.000 pada tahun 2017 hingga menjadi Rp3.141.700 pada tahun 2025. (Pemkot Kampung Maluku, 2025). Sejumlah studi empiris terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Maipita, 2013); (Hanifah & Hanifa, 2021), menemukan bahwa kenaikan upah minimum, dalam kondisi tertentu, memiliki korelasi positif dengan peningkatan pendapatan riil pekerja dan penurunan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah.

UMP merupakan instrumen kebijakan yang secara langsung memengaruhi pendapatan pekerja formal. Dalam teori ekonomi ketenagakerjaan, penetapan upah minimum yang optimal dapat meningkatkan daya beli pekerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, dalam konteks Maluku dengan sektor informal yang dominan, efektivitas UMP dalam mengurangi kemiskinan perlu dikaji secara empiris.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, nilai mata uang akan menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, barang atau jasa yang didapatkan akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. penelitian oleh (Easterly & Fischer, 2001) yang menemukan bahwa inflasi yang tinggi lebih sering merugikan kelompok miskin.

Inflasi dipilih karena dampaknya yang langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks Maluku, inflasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor unik seperti ketergantungan pada impor bahan makanan dan fluktuasi harga komoditas lokal. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung memperburuk kondisi kemiskinan melalui erosi daya beli riil.

Metode

Pada penelitian ini, variabel Tingkat Kemiskinan (Y) diukur dengan persentase penduduk miskin terhadap total populasi. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nilai variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dinyatakan dalam angka indeks 0 sampai 100 yang dihitung oleh BPS dengan tiga dimensi: kesehatan (harapan hidup saat lahir, pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil). Selanjutnya variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) diperoleh dari BPS dan ditetapkan melalui keputusan gubernur. Penelitian ini menggunakan UMP nominal tahunan (rupiah per bulan), bukan UMP riil, karena data riil tidak tersedia secara konsisten sepanjang periode 2005-2023. Yang terakhir, variabel Inflasi (X_3) menggambarkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa konsumen dari tahun ke tahun yang diukur dengan inflasi tahunan (year-on-year, %) berdasarkan indeks harga konsumen yang dipublikasikan oleh BPS.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan data deret waktu (time series) dari tahun 2005 hingga 2023 dimana pada periode ini mencakup krisis keuangan global pada tahun 2008, pelaksanaan berbagai program pengetasn kemiskinan nasional (PNPM, BLT, PKH), serta pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dengan tiga variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan inflasi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain korelasional prediktif, di mana kemiskinan menjadi variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi berganda (Pedhazur, 1982) dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 24 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara simultan dan parsial.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan inflasi terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2005–2023.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 1 Nilai Adjusted R Square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa 91,5% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen (indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan Inflasi) secara bersama-sama, sedangkan sisanya 8,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan ini.

Tabel 1. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.970	.940	.915	1.65387

2. Uji Statistik F (Simultan)

Nilai adjusted R square ini perlu diuji secara statistik. Besarnya 91,5% ini secara statistik signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai F hitung = 36,815. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen (indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan Inflasi) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Artinya, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan variasi dalam tingkat kemiskinan.

Tabel 2. Analisis Keragaman

Model	Jumlah Kuadrat	dk	Rata-rata kuadrat	F hitung	Sig.
Regression	302.095	3	100.698	36.815	.000
Residual	19.147	7	2.735		
Total	321.242	10			

3. Uji Statistik t (Parsial)

Pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model	B	Std. Error	Beta	t-hitung	Sig.
(Constant)	-44.982	18.348		-2.452	.044
UMP	-9.921E-6	.000	-.766	-7.702	.000
IPM	1.211	.270	.481	4.478	.003
INF	-1.582	.669	-.245	-2.363	.050

- a. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai t-hitung = -7,702 dan Sig. = $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi cenderung menurunkan tingkat kemiskinan di

Maluku. Koefisien regresi sebesar $-9,921E-6$ berarti setiap kenaikan 1 satuan upah minimum provinsi akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,000009921 poin, dengan asumsi variabel lain konstan.

- b. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai t -hitung= 4,478 dan $Sig. = 0,003 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 1,211 menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1 poin akan meningkatkan kemiskinan sebesar 1,211 poin. Hasil ini bertolak belakang dengan ekspektasi teoritis, mengindikasikan kemungkinan bahwa pembangunan manusia belum merata atau belum cukup inklusif dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.
- c. Inflasi berpengaruh negatif dan mendekati signifikan terhadap kemiskinan, dengan t -hitung= -2,363 dan $Sig. = 0,050$. Artinya, peningkatan inflasi cenderung menurunkan kemiskinan, meskipun pada taraf signifikansi 5% nilainya tepat berada di batas. Koefisien regresi -1,582 menunjukkan bahwa kenaikan 1 poin inflasi akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,582 poin. Hasil ini bisa terjadi jika inflasi diiringi dengan peningkatan pendapatan atau aktivitas ekonomi lokal.

Pembahasan

Berdasarkan uraian hasil analisis regresi berganda sebelumnya, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Rincian penjelasannya disajikan sebagai berikut:

- a. Ditemukan adanya hubungan kausal yang signifikan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2005 hingga 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa UMP sebagai variabel independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan UMP cenderung diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, untuk menekan tingkat kemiskinan, kebijakan peningkatan UMP menjadi salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2022), (Agustin et al., 2019) serta Hakim et al. (2024). Temuan ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Hubungan negatif antara UMP dan kemiskinan menandakan bahwa peningkatan pendapatan minimum mampu mendorong daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar secara lebih layak, sehingga potensi untuk keluar dari garis kemiskinan menjadi lebih besar. Dengan demikian, kebijakan peningkatan UMP tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja formal, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil ini menguatkan bukti empiris dari studi sebelumnya (Akbar et al., 2022); (Agustin et al., 2019) yang menekankan pentingnya peran kebijakan upah minimum sebagai instrumen ekonomi dalam menekan kemiskinan. Oleh karena itu, penetapan UMP perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosialnya terhadap kesejahteraan Masyarakat.
- b. Ditemukan adanya hubungan kausal yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2005 hingga 2023. Temuan ini menunjukkan bahwa IPM sebagai variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan IPM justru diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan. Sebaliknya, penurunan IPM berkorelasi dengan

penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara capaian pembangunan manusia dan distribusi kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan kata lain, peningkatan IPM belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara efektif. Temuan ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh (Sayifullah & Gandasari, 2016) serta (Ristika et al., 2021) yang juga mendapati IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan di beberapa provinsi, terutama di wilayah dengan ketimpangan tinggi. Fenomena serupa juga ditemukan pada daerah-daerah terpencil lain, seperti penelitian (Siregar et al., 2025) di Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa kenaikan IPM tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, di mana kelompok ekonomi tertentu lebih banyak menikmati peningkatan IPM. Selain itu, lulusan pendidikan masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang diperoleh dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa dalam konteks daerah kepulauan, peningkatan IPM seringkali belum cukup efektif dalam menekan kemiskinan tanpa diiringi kebijakan pemerataan yang lebih tegas.

- c. Terdapat hubungan kausal yang signifikan antara inflasi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2005 hingga 2023. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi sebagai variabel independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, ketika tingkat inflasi meningkat, justru angka kemiskinan cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan inflasi berasosiasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Secara teori, hubungan ini memang tidak lazim, karena inflasi umumnya dipandang sebagai faktor yang melemahkan daya beli kelompok berpendapatan rendah (*cost-push inflation*). Namun, dalam konteks tertentu, inflasi yang moderat dapat mencerminkan adanya peningkatan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi (*demand-pull inflation*). Ketika perekonomian tumbuh, aktivitas produksi dan perdagangan meningkat, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, inflasi tidak selalu bersifat destruktif, tetapi bisa menjadi indikator dinamika ekonomi yang sehat. Hasil ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks tertentu, inflasi yang moderat mungkin mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan inflasi dalam batas wajar dapat berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan. Mekanisme ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menyatakan bahwa sedikit inflasi adalah “pelumas” bagi pertumbuhan ekonomi karena mendorong produsen meningkatkan output dan penyerapan tenaga kerja (Keynes, 1936). Dalam konteks Maluku, inflasi yang dipicu oleh naiknya harga komoditas lokal (misalnya perikanan, rempah, atau hasil pertanian) justru dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga produsen, sehingga efek bersihnya menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan hasil studi (Hasibuan, 2023) yang juga menemukan pengaruh negatif inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil serupa juga dilaporkan oleh (Manangkalangi et al., 2020) di Sulawesi Tengah, yang menunjukkan bahwa inflasi dalam tingkat moderat justru berasosiasi dengan peningkatan kesejahteraan. Hal ini mendukung argumen bahwa dalam perekonomian daerah berbasis sumber daya alam atau perdagangan lokal, inflasi yang berasal dari pertumbuhan permintaan dapat menjadi sinyal ekspansi ekonomi yang berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dampak inflasi terhadap kemiskinan bersifat kontekstual. Di Maluku, inflasi yang moderat lebih banyak mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi daripada sekadar kenaikan biaya hidup. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan pada menjaga inflasi tetap stabil dalam batas wajar, bukan semata-mata menekannya serendah mungkin.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. UMP dan inflasi berpengaruh negatif, artinya peningkatan keduanya cenderung menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, IPM justru berpengaruh positif, menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum efektif menekan kemiskinan karena kemungkinan distribusi pembangunan yang belum merata di wilayah tersebut sehingga model regresi ini layak untuk menjelaskan variasi kemiskinan secara statistik.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi khusus agar peningkatan IPM benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan melalui program pendidikan vokasi, layanan kesehatan yang merata, dan pemberdayaan ekonomi kelompok miskin, serta strategi mitigasi inflasi yang pro-poor seperti stabilisasi harga pangan, subsidi logistik antar pulau, dan penguatan UMKM lokal. Namun, penelitian ini masih terbatas pada data agregat tingkat provinsi dan hanya mencakup variabel IPM, UMP, dan inflasi, sehingga belum menangkap faktor lain seperti infrastruktur, ketimpangan pendapatan, atau investasi daerah. Studi lanjutan disarankan menggunakan data yang lebih detail pada level kabupaten/kota dan menambahkan variabel tambahan tersebut agar analisis determinan kemiskinan di Maluku lebih komprehensif.

Referensi

- Agustin, N., Hidayati, M. S., Umiyati, E. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 53-64. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i1.7346>
- Akbar, A., Nazipawati, Primandari, N. R., & Al Muhariah, N. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 80-91. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i2.127>
- Alifah, K. I. & Imaningsih, N. (2023). Tingkat pendidikan, upah minimum, & tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 1-11.
- ANTARA. (18. Juli 2023). Penduduk Miskin Maluku Meningkat Pada Maret 2023. (I. Wahyudi, Ed.) Ambon, Maluku, Indonesia. Dostupné na Internet: https://ambon.antaranews.com/berita/174153/bps-penduduk-miskin-maluku-meningkat-pada-maret-2023?utm_source=chatgpt.com#mobile-nav
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2023). *Profil Kemiskinan di Maluku Maret 2023*. Maluku: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Dostupné na Internet: <https://maluku.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/645/persentase-penduduk-miskin-di-maluku-maret-2023-naik-menjadi-16-42-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2024). *Profil Kemiskinan di Maluku Maret 2024*. Ambon: Badan Pusat Statistik. Dostupné na Internet: <https://maluku.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/750/persentase-penduduk-miskin-pada-maret-2024-sebesar-16-05-persen--turun-0-37-persen-poin-terhadap-maret-2023-dan-naik-0-08-persen-poin-terhadap-maret-2022--.html>
- Chairunnisa, N. M., and Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh kesehatan, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2022, *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*. Blitar, Indonesia, 7(1), pp. 147-161. doi: 10.51289/peta.v7i1.530.

- Gifelem, M., Masinambow, V.A.J., & Tumilaar. R.L.H. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 25-36.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 8 (1), 53-62. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v8i1.2075>
- Manangkalangi, L.K., Masinambow, V.A.J., & Tumilaar. R.L.H. (2020). Analisis pengaruh pdrb dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 66-78.
- Pedhazur, E. J. (1997). *Multiple regression in behavioral research explanation and prediction*. United States of America: Christopher P.Klein.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. *Eksi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129-136. <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Mohammad Wahed, M. (2021). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12 (2), 126-139.
- Sayifullah & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6 (2), 236-255. <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal ekonomi Pembangunan*, 8 (2), 357-366.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2024). Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku - Tabel Statistik. <https://maluku.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2024). Data Inflasi. <https://malut.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>